

## PERBANDITAN DI WILAYAH SURAKARTA PADA MASA PEMERINTAHAN KOLONIAL HINDIA BELANDA (1850-1942)

**Ema Rohmawati**

Program Studi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik,  
Universitas Negeri Yogyakarta

[emaarhm@gmail.com](mailto:emaarhm@gmail.com)

### **Abstrak**

Perbanditan sering menjadi suatu permasalahan yang cukup kontroversial di masyarakat Indonesia dari masa lampau hingga masa sekarang. Terlebih lagi peristiwa kriminalitas tersebut cukup meresahkan masyarakat kota namun juga meresahkan masyarakat pedesaan pada masa itu. Tulisan ini akan difokuskan pada permasalahan kriminalitas perbanditan yang terjadi di sekitar wilayah Surakarta pada masa kolonial Hindia Belanda. Adapun tujuan dari tulisan ini ialah menganalisis adanya peristiwa kriminalitas, kondisi wilayah Surakarta abad ke-19 hingga abad ke-20, muncul dan berkembangnya peristiwa kriminalitas berupa perbanditan, dan upaya pencegahan serta pemberantasan peristiwa kriminalitas perbanditan tersebut. Penulisan karya ini menggunakan metode historis dengan teknik penelitian sejarah dan studi literatur atau studi pustaka. Hasil temuan riset dengan metode dan teknik penelitian tersebut yaitu berupa penjelasan mengenai bagaimana kondisi sosial-ekonomi masyarakat di cakupan wilayah Surakarta yang mengalami ketimpangan sosial-ekonomi pada masa kolonial Hindia Belanda yang pada akhirnya mengakibatkan munculnya peristiwa kriminalitas berupa pergejolakan perbanditan. Berbagai bentuk peristiwa perbanditan muncul di wilayah tersebut hingga mendorong adanya upaya berupa suatu pencegahan dan pemberantasan oleh pihak pemerintah Kolonial Hindia Belanda agar perbanditan tidak semakin meresahkan masyarakat terutama pemerintahan Kolonial Hindia Belanda. Namun, berbagai upaya tersebut tidak dapat dikatakan berhasil hingga pada akhirnya hadir organisasi-organisasi yang mampu menampung keresahan penduduk hingga perbanditan dapat teratasi pada masa itu.

**Kata kunci:** Bandit, Kolonial, Surakarta, Hindia Belanda, Sarekat Islam.

### **Abstract**

*Bandits have often been a quite controversial issue in Indonesian society from the past to the present. What's more, the crime incident was quite disturbing to the urban community but also disturbing the rural community at that time. This paper will cover the problem of banditry crime that occurred around the Surakarta area during the Dutch East Indies colonial period. The purpose of this paper is to analyze the existence of criminal incidents, the conditions of the Surakarta region from the 19th to the 20th centuries, the emergence and development of criminal activities in the form of banditry, and efforts to prevent and eradicate these criminal banditry events. The writing of this work uses the historical method with historical research techniques and literature studies or literature studies. The results of the research findings using these research methods and techniques are in the form of*

*an explanation of how the socio-economic conditions of the people in the Surakarta area experienced socio-economic inequality during the Dutch East Indies colonial period which ultimately resulted in the emergence of criminal events in the form of banditry turmoil. Various forms of banditry events emerged in the region which prompted efforts in the form of prevention and eradication by the Dutch East Indies Colonial government so that banditry would not further disturb the public, especially the Dutch East Indies Colonial government. However, these efforts could not be said to be successful until finally there were organizations that were able to accommodate the unrest of the population so that banditry could be overcome at that time.*

**Keywords:** *Bandits, Colonial, Surakarta, Dutch East Indies, Sarekat Islam.*

## **PENDAHULUAN**

Aktivitas penjajahan pada masa pemerintah Kolonial Hindia Belanda berupa pembentukan kongsi dagang, pemberlakuan sistem monopoli dan penetapan kebijakan-kebijakan yang disertai sanksi nyata atas pelanggaran yang banyak merugikan rakyat Indonesia dan bahkan merugikan penguasa-penguasa lokal merupakan penyebab utama tersulutnya amarah dari berbagai pihak dan memberikan dorongan kepada beberapa orang untuk melakukan tindakan kriminalitas. (Gemilang dkk. 2021:1) Selain faktor kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, terdapat faktor lain yang juga mendorong terjadinya tindak kriminalitas pada masa itu yaitu adanya suatu kecemburuan sosial akibat adanya ketimpangan ekonomi dan sosial.

Pulau Jawa merupakan salah satu pulau di Indonesia yang pada masa kolonial Hindia Belanda hingga sekarang telah menjadi pusat dari perekonomian dan perindustrian, hal tersebut bukan berarti tingkat ekonomi masyarakat berjalan secara merata atau setara, tingkat ekonomi masyarakat masih tetap mengalami ketimpangan yang cukup jauh antar satu sama lain, ditambah dengan mobilitas penduduknya yang selalu terjadi tentu memicu kesempatan yang besar untuk terjadinya kriminalitas. Ketimpangan ekonomi sebagai pemicu utama dalam tindak kriminalitas perbanditan yang telah disebutkan sebelumnya dapat tergambarkan dengan jelas ketika seorang dengan ekonomi yang berpenghasilan rendah, menganggur, dan berkondisi tidak memiliki pemasokan dan keuangan (miskin) pada akhirnya menjadikan status ekonominya tersebut untuk melakukan pencurian

atau perampokan yang biasa dilakukan oleh para bandit pada umumnya. (Tifaransyah dkk. 2021:18)

Umumnya, aktivitas perbanditan dapat terjadi diberbagai wilayah terutama di Pulau Jawa. Aktivitas yang meresahkan banyak pihak ini ternyata juga melanda wilayah Surakarta pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Wilayah Surakarta pada masa itu dapat dikatakan sebagai salah satu wilayah yang cukup penting dalam struktur pemerintahan lokal dan kolonial serta menjadi wilayah pusat dari segala kegiatan penduduk di provinsi Jawa Tengah. Maka dari itu, berdasarkan uraian di atas penulis akan melakukan kajian penelitian mengenai perkembangan tindak kriminalitas perbanditan di wilayah Surakarta pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda, hasil kajian penelitian tersebut dituangkan ke dalam artikel yang berjudul *Perbanditan di Wilayah Surakarta Pada Masa Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda (1850-1942)*.

## **METODE**

Kajian sejarah mengenai kriminalitas di Indonesia pada masa kolonial Hindia Belanda umumnya telah banyak dikaji oleh para sejarawan maupun mahasiswa dalam bentuk thesis, buku maupun jurnal ilmiah yang telah melalui proses penelitian, studi kasus atau pun studi literatur. Dalam kajian penulisan artikel ini, penulis akan lebih memfokuskan penulisan artikel pada kriminalitas yang berbentuk perbanditan dan lebih memfokuskan penulisan pada salah satu wilayah di Jawa Tengah yaitu Surakarta dan berfokus pada jangka waktu dari tahun 1850 hingga 1942.

Dalam proses penulisan artikel ini penulis menggunakan metode penelitian sejarah sesuai dengan metode penelitian milik Kuntowijoyo, yang terdiri dari lima tahap, yaitu; pertama, pemilihan topik dengan dasar kedekatan emosional dan kedekatan intelektual sekaligus membuat rencana penelitian. Kedua, pengumpulan sumber baik sumber primer dan sekunder, berupa surat kabar lama, buku, jurnal, dan disertasi. Ketiga, verifikasi sumber dengan memperhatikan autentisitas atau keaslian sumber dan kredibilitas sumber. Keempat, interpretasi dengan melakukan cara analisis dan sintesis, dalam tahap ini perlunya menghindari subjektivitas

penulisan sejarah. Kelima, penulisan atau historiografi dengan tetap memperhatikan aspek kronologi. (Kuntowijoyo 2013:69–80)

Kajian penulisan artikel ini menggunakan sumber primer berupa surat kabar *de locomotif* (1931). Untuk sumber sekunder menggunakan buku bacaan, salah satunya karya Suhartono berjudul *Bandit-bandit Pedesaan di Jawa (Studi Historis 1850-1942)* terbitan tahun 1993 yang menjelaskan mengenai kondisi kriminalitas yang terjadi di wilayah pulau Jawa. Untuk sumber pendukung diambil dari beberapa jurnal ilmiah, kajian disertasi dan web page yang dinilai cukup kredibel.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Perbanditan**

Maraknya tindak kriminalitas di Indonesia terutama di pulau Jawa seperti pencurian, penodongan, pencopetan, perampasan, penjambretan, pembegalan dan lainnya merupakan hal-hal yang sering dilakukan oleh bandit. Bandit atau yang dapat disebut dengan istilah *kecu* ini merupakan para pelaku dari aksi kriminalitas tersebut yang dinilai sebagai pengganggu keamanan dan kesejahteraan masyarakat. (Tifaransyah dkk. 2021:17) Menurut Suhartono dalam bukunya yang berjudul *Bandit-bandit Pedesaan di Jawa (Studi Historis 1850-1942)* perbanditan ini dianggap bukanlah masalah kriminalitas yang berfokus pada ekonomi melainkan berfokus pada sosial, karena pada masa kolonial Hindia Belanda tujuan dan alasan utama seseorang melakukan aksi perbanditan kebanyakan ialah untuk kepentingan sosial bukan untuk kepentingan memperkaya diri. Hal tersebut dapat didukung oleh pernyataan Ari Kurnia, ia mengatakan bahwa terjadinya fenomena perbanditan ini merupakan sebuah bentuk protes sosial yang diakibatkan dari adanya kemiskinan, penindasan, dan tekanan dari berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda pada masa itu.

Lalu, untuk faktor selanjutnya yang memperkuat marak terjadinya tindakan kriminalitas perbanditan ini ialah terbukanya kesempatan dan pemicu yang luas untuk melakukan sebuah tindak kekerasan dan juga kriminalitas akibat dari upaya perebutan kekuasaan karena hal tersebut mampu mendorong terciptanya suatu negara kekerasan atau *state of violence*. Ditambah dengan adanya penerapan rezim

ketakutan atau yang dapat disebut *rigime of fear* pada masa perkembangan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang membuka lebar kesempatan kepada kelompok kriminalitas untuk berkembang dan menyebar secara luas. Tak cukup sampai disitu, faktor pemicu adanya tindakan kriminalitas dan kekerasan terutama mengenai perbanditan ini terlihat juga pada peranan pemerintah kolonial dalam mengupayakan proses modernisasi kota dengan menerapkan standar penataan kota barat yang mana hal tersebut dilakukan dengan tujuan memperbaiki kampung kumuh, menata kembali kota-kota agar teratur, dan menertibkan serta memakmurkan lingkungan kota maupun perdesaan.

Dalam proses modernisasi kota tersebut pastinya aktivitas pendudukan akan sangat padat dengan aksesibilitas yang mudah dan fasilitas yang lengkap, bahkan hal tersebut justru memicu terjadinya peristiwa kriminalitas dilaksanakan secara lancar oleh para bandit-bandit. Terlebih lagi tindakan kriminalitas umumnya akan meningkat dan berfokus pada ruang pasar, sekitar pasar, jalan-jalan yang dilalui oleh masyarakat yang akan pergi maupun akan pulang dari pasar, menurut pernyataan Putri Agus Wijayati (Wijayati, 2020).

Sudut pandangan mengenai perbanditan sendiri berbeda antara kacamata pemerintah kolonial Hindia Belanda dengan kacamata rakyat Indonesia. Bandit dikenal sebagai aksi pelaku kriminalitas yang meresahkan dan mengganggu kenyamanan menurut sudut pandang pemerintah kolonial Hindia Belanda, sedangkan di satu sisi lain bandit malah dianggap sebagai pahlawan menurut sudut pandang rakyat Indonesia. Dapat dikatakan seperti hal tersebut, karena pada masa itu satu-satunya yang berani menentang dan melawan kebijakan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda yang berupa tanam paksa, perluasan perkebunan di perdesaan dan juga hal lain yang sangat merugikan rakyat Indonesia hanyalah para bandit-bandit ini. (Tifaransyah dkk. 2021:16–17)

Pemerintah kolonial Hindia Belanda menganggap bahwa bandit hanyalah suatu hal yang semata-mata mengganggu dan merusak keamanan serta ketentraman masyarakat, maka dari itu pemerintah kolonial Hindia Belanda selalu berusaha untuk melindungi dan membasmi pelaku aksi bandit-bandit dengan cara memperkuat kepolisian. Namun, hal tersebut tentu tidak membuahkan hasil yang

maksimal dan tidak pernah berhasil dilakukan karena pemerintah sendiri tidak mengetahui akar dari sebab adanya aksi perbanditan tersebut. (Suhartono 1995: 5) Kesimpulan yang dapat ditarik dari akar sebab munculnya perbanditan ini ialah dengan alasan keterhimpitan masyarakat secara ekonomi dan sosial serta tekanan dari kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Aksi kriminalitas berbentuk perbanditan ini tentu tidak hanya menyerang di kawasan perkotaan saja, kawasan wilayah perdesaan juga menjadi salah satu sasaran empuk para bandit untuk melakukan tindak kriminal seperti pencurian dan perampokan, bahkan tindak kriminalitas perbanditan yang terjadi di perdesaan umumnya jauh lebih beresiko dan sering terjadi karena ketimpangan ekonomi yang terlihat sangatlah berbanding jauh satu sama lain. Terlebih lagi di perdesaan terdapat sektor pertanian yang meluas dan cukup mengalami tekanan karena merupakan sumber ekonomi utama yang dapat menunjang kebutuhan dan pemasokan keuangan.

Perdesaan pun terombang-ambing akibat dilanda arus perkebunan yang pada akhirnya mendesak keberadaan dan kehidupan sosial ekonomi petani. Dampak masuknya perkebunan ke pedesaan pun memberikan efek yang signifikan kepada para petani, terlebih lagi perkebunan tak hanya menelan tanah di pedesaan namun juga tenaga kerja petani. Maksud dari hal tersebut ialah bagi para petani yang tidak mendapatkan kesempatan dalam perkebunan tersebut dan tidak mendapat kesempatan hajat hidup akan semakin menderita dan semakin parah. Hal tersebut jelas menyerang kehidupan sosial ekonomi petani, para petani merasa bahwa lahan milik mereka telah direbut atau dicuri oleh perkebunan dengan cara modern yang mana bagi petani cara-cara tersebut masih sangat awam bagi para petani pada masa kolonial Hindia Belanda. Terlebih lagi karena petani tidak mengetahui akan cara modern tersebut mereka tidak bisa mempertahankan hak milik dan membela diri ketika tanah yang mereka miliki direbut untuk perkebunan.

Emosi para petani pun tersulut dan mereka merasa tidak puas akan perebutan tanah tersebut, maka dari itu mereka memiliki keinginan untuk membalas dendam dengan menggunakan cara yang cukup kasar. Pembalasan inilah yang nantinya akan muncul dengan istilah *balance of power* yang mana tindakan pembalasan ini

tetap dilakukan dengan cara tradisional namun tindakan tersebut berbentuk destruktif dan kriminal, meliputi pencurian, perampokan, dan bahkan pembunuhan. Hal tersebut memang mencerminkan budaya perdesaan berupa budaya protes petani yang sering ditempuh oleh penduduk desa dalam menghadapi suatu masalah. Perbanditan sosial atau perbanditan yang terjadi di perdesaan ini dianggap memiliki makna sebagai sesuatu yang dapat mengelola mobilitas sosial dan dikategorikan sebagai oposisi atau lawan terhadap pemerintah kolonial Hindia Belanda yang dapat dikatakan sebagai perlawanan setiap hari (*everyday form of resistance*). (Suhartono 1995:3-9).

Pembahasan di atas sesuai dengan ungkapan yang diberikan oleh Suhartono W. Pranoto dalam bukunya yang berjudul *Dalam Jawa: Bandit-bandit Pedesaan Studi Historis (1850-1942)* yang menyatakan “perbanditan yang timbul di perdesaan tidak dapat dilepaskan dengan hilangnya fungsi tanah”. Bahkan seorang begawan sejarah dalam *Prisma* pada tanggal 1 Januari 1977 bernama Sartono Kartodirjo menyatakan hal serupa terkait pengaruh dari perebutan lahan tanah sebagai berikut: “Pengaruhnya cukup besar di daerah perdesaan, terutama pada masa kontrol pemerintah agak lemah”.

Dapat dikatakan seperti itu karena dapat diketahui juga bahwa para petani yang beralih profesi sebagai bandit ini tidak bisa dikatakan sebagai bandit yang biasa karena mereka melakukan perampokan, pencurian dan bahkan pembunuhan bukan atas dasar kepentingannya sendiri atau kepentingan memperkaya diri namun atas dasar kepentingan sosial berbentuk protes petani. Maka dari itu bandit-bandit di desa umumnya dikenal sebagai bandit sosial. (Hanggoro 2019b)

Bahkan tekanan yang dirasakan pihak perkebunan dinyatakan oleh Suhartono W. Pranoto dalam bukunya yang berjudul *Jawa: Bandit-Bandit Pedesaan Studi Historis 1850—1942*, yaitu sebagai berikut:

*Gangguan perbanditan ini sangat menakutkan, lebih-lebih bagi para personil perkebunan yang tinggal di desa  
Tentu perasaan khawatir menyerang pihak perkebunan karena bandit sosial pun sudah menargetkan sasarannya di antaranya ialah; pemilik dan mandor perkebunan, Pak Bekel, orang Belanda, Tionghoa, dan tuan tanah.* (Hanggoro 2019a)

Keberadaan bandit memang menguat pada abad ke-19 dan juga abad ke-20, awalnya ditandai dengan peristiwa protes petani di wilayah Kabupaten Probolinggo

pada tahun 1834, di sana sebuah pembakaran tebu dilakukan karena bentuk protes adanya pelaksanaan tanam paksa. Hal tersebut mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda maupun penguasa lokal di wilayah Probolinggo, hingga suatu peraturan dikeluarkan oleh residen Probolinggo guna memadamkan kebakaran tersebut dengan aturan bahwa penduduk harus turut andil dalam memadamkan kebakaran tetapi tidak boleh membawa barang yang mudah terbakar, apabila melanggar maka akan mendapat sanksi hukuman keras yang akan mereka terima. Peristiwa pembakaran yang terjadi di Probolinggo tersebut menjadi awal dari beruntunnya kejadian pembakaran los dan gudang perkebunan di setiap tahunnya. Kasus dalam pertahun pun dapat menembus 100 kali pembakaran, seperti pada tahun 1846 yang mana kasus pembakaran mencapai 144 kali walaupun pada tahun-tahun berikutnya kasus pembakaran tersebut menurun. (Hanggoro 2019a)

Kriminalitas berbentuk perbanditan ini pun masih dapat dibagi dalam beberapa jenis atau dapat dikatakan dibagi dalam tiga jenis oleh Eric Hobsbawn, seorang sejarawan sosial. Pertama ialah perbanditan yang bermartabat seperti bentuk perbanditan yang dilakukan oleh Robin Hood, kedua ialah perbanditan kelompok gerilya, dan ketiga atau yang terakhir merupakan perbanditan yang dilakukan oleh kelompok penebar eror. Umumnya, para bandit-bandit sosial yang ada di perdesaan merupakan seorang kaum tani yang awalnya harus berguru di lembaga keagamaan untuk belajar berbagai ilmu, mulai dari ilmu pengetahuan hingga bahkan ilmu bela diri dan ilmu gaib. Maka dari itu, perbanditan memiliki bentuk perbanditan lain yang sedikit berbeda yaitu perbanditan yang dikaitkan dengan hal-hal yang berbau mistis. Dapat dikatakan hal tersebut karena pada masa itu muncul bandit yang mengatakan bahwa dirinya merupakan utusan dari Tuhan yang memiliki tujuan untuk membebaskan rakyat dari suatu penindasan dari pihak kolonial Hindia Belanda dan penguasa yang semena-mena.

Hal tersebut dibuktikan dengan adanya perbanditan yang dilakukan oleh Mas Zakaria seorang Entong Gendut di Batavia yang berasal dari Banten dan perbanditan yang dilakukan oleh para kelompok *kecu* di wilayah Surakarta dan Yogyakarta. Jika melihat contoh dari perbanditan yang berkaitan dengan hal-hal mistis di atas, dapat dikatakan bahwa perbanditan tidak hanya dilakukan dengan cara

perseorangan, namun juga dilakukan secara berkelompok. Dan umumnya, perbanditan yang dilakukan secara perseorangan dilakukan dalam tindak kriminalitas pembakaran sedangkan perbanditan yang dilakukan secara kelompok dilakukan dalam tindak kriminalitas perampokan, pencurian, atau pun pembunuhan karena kerja sama antar bandit dalam kelompok perbanditan tersebut dianggap akan mempermudah dalam tindak kriminalitas yang dilakukan. Dalam praktiknya sendiri, seorang bandit memiliki jabatan dan juga tugas masing-masing yang harus dilaksanakan. Jabatan serta tugas tersebut ialah:

1. Benggol, jabatan ini merupakan posisi paling tinggi dan struktur organisasi bandit karena umumnya seorang benggol memiliki suatu ilmu atau kesaktian yang mana ilmu atau kesaktian itu nantinya akan diajarkan kepada para anggotanya agar ilmu atau kesaktian tersebut menjadi hal yang dapat diberikan. Ilmu atau kesaktian itu dimiliki dengan tujuan untuk memperkuat kelompok dalam menjalankan aksi kriminalitasnya dan meminimalisir terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan tindak kriminalitas yang para bandit lakukan. Walau memiliki ilmu atau kesaktian yang cukup tinggi, benggol tetap membiasakan diri untuk bersikap ramah kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan agar mampu menarik simpati dari masyarakat terhadap keberadaannya atau keberadaan para bandit.
2. Wakil benggol, jabatan ini merupakan posisi yang mana tempat ia berada ialah di samping benggol dengan maksud mendampingi seorang benggol. Jabatan wakil benggol memiliki tugas seperti wakil-wakil pada umumnya, yaitu sebagai seorang yang memiliki kepercayaan dari benggol dan yang akan menggantikan peran benggol ketika sang benggol sedang berhalangan untuk hadir atau memimpin.
3. Pemegang harta rampokan, jabatan dan tugas dari posisi ini tidak perlu dipertanyakan lagi karena menurut namanya saja dapat diketahui bahwa posisi ini bertugas untuk memegang harta rampokan. Tanggungjawabnya sangat besar karena harus menjaga dan menyimpan harta hasil rampokan, tak hanya itu mereka yang berada di posisi ini juga memiliki tugas untuk

mendistribusikan harta rampokannya, baik kepada para anggota lain maupun kepada masyarakat yang sedang membutuhkan.

4. Telik Sendi, jabatan dari posisi ini memiliki tugas untuk memantau keadaan lingkungan sekitar target yang akan dirampok. Hal ini dilakukan para bandit sebelum beraksi dengan tujuan agar tindak kriminalitas yang akan mereka lakukan nanti berjalan dengan lancar serta tidak ada gangguan atau penangkapan bandit-bandit.
5. Cungkuk, jabatan dari posisi ini memiliki tugas yang hampir sama dengan telik sendi yaitu memantau keadaan lingkungan sekitar target yang akan dirampok, yang membedakannya cungkuk menjalankan tugasnya saat aksi perampokannya sedang terjadi. Para cungkuk pun juga memiliki tugas untuk memberi isyarat kapan mulai dan berhentinya perampokan, karena mereka mengintai keadaan sekitar apakah ada ancaman yang dapat melanda aksi perampokan tersebut atau tidak.
6. Bala-bala, jabatan dari posisi ini memiliki tugas yang utama yaitu sebagai kelompok yang akan menghadapi serangan dari para korban atau istilahnya yang menjadi penggelut korban perampokan. Tak hanya itu, posisi ini juga memiliki tugas untuk mengangkut hasil rampokan yang mereka dapatkan dari korban yang mereka incar.

Demikian jabatan dan juga posisi yang dimiliki tiap-tiap anggota dalam suatu kelompok perbanditan. Dengan adanya posisi-posisi ini maka tindak kriminalitas perbanditan dapat dilakukan dengan lancar dan sering mendapatkan hasil yang memuaskan. Walaupun hasil yang memuaskan bagi para bandit ini sebenarnya memiliki dampak yang cukup kuat di bidang sosial dan juga ekonomi. Pemerintah kolonial Hindia Belanda dan para pemilik perusahaan perkebunan swasta sangat merasakan dampak dari perbanditan ini dalam bidang sosial, hal tersebut dapat terlihat ketika banyak kematian yang terjadi akibat dari maraknya aksi perbanditan di kawasan sekitar perkebunan. Hal tersebut tentu mempengaruhi rendahnya pertumbuhan penduduk di daerah perkebunan. Selain itu, para bandit ini juga mengganggu stabilitas keamanan daerah terlebih lagi rasa sepenanggungan senasib

yang dimiliki para bandit dengan masyarakat menjadikan hubungan mereka berjalan baik dan hal tersebut makin mempermudah aksi kriminalitas mereka.

Lalu, dampak yang terjadi di bidang ekonomi dapat dilihat pada dampak yang menimpa pemerintah kolonial Hindia Belanda dan masyarakat miskin serta para petani. Umumnya, bandit akan menyamar sebagai salah satu anggota dari mereka (pemerintah Kolonial Hindia Belanda, penguasa lokal, dan penguasaan perkebunan swasta) agar dapat menjalankan aksi mencuri uang serta barang yang nantinya akan dibawa kabur menuju hutan dan bahkan sampai ke daerah-daerah terpencil. Hasil dari perbanditan ini nantinya akan dibagikan kepada masyarakat miskin dan para petani agar bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang awalnya sangat susah terpenuhi (Tifaransyah dkk. 2021).

## **B. Bandit-bandit di Wilayah Surakarta**

Pada masa kolonial Hindia Belanda, Surakarta merupakan salah satu wilayah kota tradisional yang diorganisir langsung oleh pejabat kolonial Hindia Belanda yang disebut residen karena berada di wilayah teritorial Pemerintah Kolonial Hindia Belanda, maka dari itu Surakarta juga disebut sebagai Keresidenan. Dalam bidang sosial, Surakarta tidak terlepas dari struktur masyarakat yang terbagi menjadi tiga golongan, yaitu golongan orang Jawa yang bertempat tinggal di wilayah pedesaan, kemudian orang Eropa yang sebaai besar ialah warga negara Belanda, dan juga orang Cina dan Arab yang menempati wilayah kota-kota.

Tumbuh sebagai ibukota kerajaan Jawa, Surakarta sempat mengalami siklus *eropenisasi* pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Mulai banyaknya komunitas berkulit putih dan perkembangan pada bidang hukum maupun pendidikan menjadi salah satu ciri dari adanya eropenisasi di Surakarta. Tak hanya itu, bidang ekonomi dan pembangunan Surakarta juga mengalami peningkatan pada awal abad ke-20 dengan adanya penerapan prinsip kerja bebas yang didukung oleh para pengusaha swasta. Ekonomi keuangan pada masa ini bertumbuh pesat karena dipengaruhi oleh suksesnya perdagangan yang dipegang dan dikuasai oleh orang-orang Cina dan Arab. Mereka menggunakan batik, perkebunan tebu, serta industri

lokal seperti rokok kretek sebagai sumber penghasilan dengan daya nilai jual yang cukup tinggi.

Beberapa sarana dan prasarana dibangun untuk mendukung pesatnya perdagangan dan ekonomi uang pada masa ini, terlihat pada upaya pemerintah Hindia Belanda yang melakukan perbaikan dan perluasan jalan-jalan yang berada di pusat kota pada daerah residensi Eropa dengan tujuan agar arus ekonomi yang berjalan dari timur mengalami kelancaran. Selain itu pembangunan jembatan yang menghubungkan Surakarta dan Sukoharjo serta daerah Bacem juga dilakukan untuk memudahkan mobilisasi para pedagang, jembatan ini dibangun oleh Pakubuwono X pada tahun 1915. Ditambah dengan pembangunan dalam bidang transportasi terlihat pada pembangunan trem (kereta yang memiliki rel khusus dalam kota) sebagai angkutan umum yang mampu mengantar orang-orang Eropa yang lain. Adanya trem ini menjadi salah satu bentuk bukti bahwa pada masa itu Surakarta sudah mengalami modernisasi, namun sayangnya adanya fasilitas trem ini tetap tidak dapat dirasakan oleh seluruh penduduk karena tarif ongkosnya yang terlalu mahal jadi hanya dapat digunakan oleh orang-orang Eropa saja dan hal tersebut tentu saja menimbulkan unsur diskriminasi etnis dan sosial. (Gemilang dkk. 2021:4–5)

Penerapan kanonisasi di beberapa bidang seperti terdapat pada bidang hukum menjadi bentuk dari berlangsungnya *eroplanisasi* di Surakarta. bukti dari kanosasi dalam bidang tersebut dapat dilihat pada peraturan pembangunan rumah di dalam kota, peraturan kepolisian, peraturan tentang kepala desa, dan peraturan-peraturan lainnya. Kanonisasi ini tentu memiliki dampak bagi masyarakat di wilayah Surakarta dan dampak yang paling berat dirasakan oleh kaum elit tradisional di wilayah tersebut karena adanya kebijakan mengenai reorganisasi khususnya di bidang agraria. Kebijakan tersebut dinilai sebagai keinginan dari penguasa kolonial Hindia Belanda yang ingin mendominasi atau bahkan ingin menghapus hukum tradisional, karena dari para penguasa pribumi Jawa sendiri tidak menemukan sumber yang mendukung mereka dalam hal tersebut dan yang muncul dalam laporan kebijakan malah sebaliknya. Lalu, kanonisasi juga menimpa pada bidang sastra, tatanan dan busana, dan bidang-bidang yang lain, ditambah dengan adanya

kanonisasi budaya tentu hal tersebut semakin mengkhawatirkan dan memberikan kegelisahan terhadap masyarakat pribumi mengenai identitas mereka atau identitas Jawa. (Susanto 2017:8–13)

Kota Surakarta sering kali mendapat campur tangan dari pihak pemerintah kolonial Hindia Belanda baik dalam bidang perdagangan maupun perpolitikan kerajaan. Maka dari itu, selain hampir kehilangan identitasnya, wilayah Jawa terutama Surakarta pada masa itu juga mulai marak terjadinya tindak kriminalitas yang dilakukan oleh para bandit kota maupun desa. Hal tersebut tentu akibat dari kecemburuan dari ketimpangan sosial dan masyarakat yang disebabkan oleh kecurangan pemerintah kolonial Hindia Belanda, penguasa lokal yang keji, dan juga para pengusaha swasta yang menginginkan banyak keuntungan. Karena korban dari para bandit ini merupakan musuh dari penduduk maka penduduk sendiri menganggap para bandit sebagai teman mereka terutama pada masa Hindia Belanda. (Pranoto 2008:41–42) Bahkan para penduduk berupaya untuk melindungi bandit-bandit ini dari kejaran polisi karena nantinya hasil dari rampok tersebut akan diberikan juga kepada para penduduk. Praktik dari perbanditan atau *kecu* ini merupakan fenomena kriminalitas yang kiranya disebabkan oleh motif ekonomi yaitu kekurangan pangan. Walau sebenarnya kriminalitas di Surakarta memiliki dua motif berbeda akan penyebab dari adanya perbanditan ini, yaitu karena faktor ekonomi yang kemudian tindakannya berupa penggedoran atau perampokan dan karena faktor permasalahan politik yang mana tindakannya nanti akan berupa penculikan serta pembunuhan. (Tifaransyah dkk. 2021:6)

Wilayah yang menjadi sasaran utama para bandit mulai dari pertengahan abad ke-19 hingga awal abad ke-20 merupakan daerah Colomadu dengan target awal para bandit ini ialah para etnis Cina. Hal tersebut dikarenakan pada masa itu di Surakarta terdapat permasalahan sosial berupa sentimen rasial kaum pribumi kepada kaum etnis Cina. Walau begitu, sasaran dari para bandit pun semakin beragam terlebih lagi ketika mereka merasa dirugikan pihak pemerintah kolonial terutama kolonial Hindia Belanda sehingga sasaran mereka bertambah lagi yaitu orang Eropa, orang kaya asing, dan juga orang Jawa yang berada di kalangan menengah keatas. Hingga dapat dikatakan pada tahun 1915, tindak kriminalitas mulai

meningkat terdapat 51 kasus praktek perbanditan atau *perkecuan* yang mana apabila dibandingkan dengan tahun 1900-an memiliki jarak jumlah yang sangat jauh. Kasus pun terus meningkat lagi di tahun 1919 tercatat 85 kasus, namun pada akhirnya turun secara drastis menjadi 24 kasus pada tahun 1924. (Rahmana 2018:55–56)

Beberapa peristiwa di antaranya seperti yang terjadi di desa Kretek, Sragen pada tanggal 15 November 1973 yang mana terdapat seorang *bekel* kedatangan gerombolan *kecu* yang terdiri dari dua puluh orang dengan mata gelap, mereka membunuh istri tua dari sang *bekel* yang tidur di rumah belakang sedangkan istri muda sang *bekel* selamat karena tidur di rumah muka. Kekayaan yang dibawa oleh gerombolan *kecu* tersebut terdiri dari 11 ekor kerbau, beberapa pikul padi, serta kekayaan seharga f 108, 84 dan membawa seluruh hasil rampokan tersebut ke wilayah Grobogan. Lalu, pada tanggal 17 Juni 1880 di wilayah Gebong, Simo seorang pengusaha perkebunan juga didatangi oleh bandit. Para bandit-bandit menemui pengusaha perkebunan tersebut untuk melampiaskan rasa penasaran dan kewanan mereka yang sudah lama mengincar rumah para “tuan besar”, terlebih lagi para pengusaha perkebunan tersebut juga merupakan penyewa tanah yang dianggap sebagai salah satu aparat yang juga merugikan para petani. (Suhartono 1995:144).

Lalu, terdapat juga salah satu contoh peristiwa perbanditan yang menimpa wilayah Surakarta pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang tertuang pada salah satu artikel berjudul *NED.-INDIË Brutale inbraak door gemaske den bandiet bij Solosche bakker. Bakkerszoon en waker gewond; de dader ontsnapt.* di surat kabar lama Belanda *De Locomotief: Derde Blad* edisi Semarang: Sabtu, 7 Februari 1931., yang berbunyi:

*Onze correspondent te Solo meldt ons heden telefonisch : Inden afgelopen nacht te ongeveer drié uur heeft er een brutale inbraak plaats gehad bij den bekenden bakker Gaba Setoe, Messin. Tegen drie uur wist een gemaskeerde bandiet zich toegang tot het huis te verschaffen en zonder gehoord te worden, binnen te komen. Hij heeft toen de Chineesche vrouw wakker gemaakt en van haar een bedrag van f 200.— geëischt. Als zij het niet onmiddellijk wilde geven, zou hij haar vermoorden en aan deze bedreiging zette hij kracht bij met een mes. Gelukkig echter was de zoon, die inde kamer er naast sliiep, door het rumoer wakker geworden. Hij ging kijken wat er was, zag de bedreiging van zijn moeder door den bandiej, en viel dezen ongewapend aan. Een worsteling volgde, waarbij de dief gebruik maakte van zijn mes en den zoon wonden toebrecht aan hoofd en borst, die echter niet levensgevaarlijk zijn. Tijdens de*

*worsteling schoot ook een waker te hulp, die eveneens door den bandiet gewond werd : hem werd een oor afgekapt. De bandiet zette het toen op een loopen en wist te ontkomen. Men heeft echter alle hoop dat men er in zal slagen hem zeer spoedig te pakken te krijgen. Vermoedelijk is het een witter, die een paar dagen geleden in het huis gewerkt heeft.*

Dengan arti:

“Koresponden kami di Solo melaporkan kepada kami hari ini melalui telepon: Pada larut malam sekitar jam tiga ada perampokan brutal di pembuat roti terkenal Gaba Setoe, Messin. Sekitar pukul tiga, seorang bandit bertopeng berhasil mendapatkan akses ke rumah dan masuk tanpa terdengar. Dia kemudian membangunkan wanita Cina itu dan menuntut darinya sejumlah 200 gulden. Jika dia tidak ingin segera memberikannya, dia akan membunuhnya dan dia memperkuat ancaman ini dengan pisau. Untungnya, bagaimanapun, putranya, yang tidur di kamar sebelahnya, telah terbangun oleh kebisingan. Dia pergi untuk melihat apa yang ada di sana, melihat ancaman kepada ibunya oleh bandit, dan menyerangnya tanpa senjata. Sebuah perjuangan terjadi, di mana pencuri menggunakan pisaunya dan menimbulkan luka di kepala dan dada putranya, tetapi mereka tidak mengancam jiwa. Selama perjuangan, seorang penjaga juga datang untuk menyelamatkan, yang juga terluka oleh bandit: sebuah telinga dipotong. Bandit itu kemudian meletakkannya di atas lingkaran dan berhasil melarikan diri. Namun, ada harapan bahwa kita akan berhasil menangkapnya segera. Agaknya itu adalah orang kulit putih, yang bekerja di rumah beberapa hari yang lalu.” (Semarang: *De Locomotief*, 7 Februari 1931). (De Groot, Kolff, dan Co 1931)

Berbagai peristiwa yang terus-menerus terjadi membuat para penduduk yang mempunyai kekayaan semakin takut hingga mencoba untuk membentengi diri. Berbagai upaya mereka lakukan, mulai dari melapor polisi, membentengi rumah dengan aparat polisi, dan lain sebagainya. Upaya pencegahan pun semakin diperkuat pada tahun 1870-an karena peningkatan gangguan para bandit, hingga residen *Zoutelief* memberikan perintah untuk menutup jalan-jalan desa dan melakukan ronda di malam hari demi mengurangi peningkatan peristiwa perampokan, pencurian serta pembunuhan oleh para bandit. (Suhartono 1995:145)

### **C. Upaya Mengatasi Kriminalitas (Perbanditan)**

Adanya kriminalitas berbentuk perbanditan ini tentunya sangat meresahkan masyarakat kaum kelas menengah atas pada masa Hindia Belanda. Segala upaya pengerahan perlindungan mereka lakukan agar senantiasa aman dari tindak aksi perbanditan tersebut. Namun, tindak kekerasan yang dilakukan oleh para bandit terus meningkat dan menjadi teror di setiap malamnya. Pemerintah kolonial Hindia Belanda pun mencoba mengupayakan pemberantasan perbanditan tersebut dengan

cara mengirimkan *Marsose* untuk memberantas para bandit tersebut di wilayah Jawa, hal tersebut dijelaskan dalam buku yang berjudul *Strongmen dan Kelompok Kekerasan di Jawa* karya Yanwar Pribadi yang diterbitkan pada tahun 2014. Selain itu, ajudan milik penguasa lokal jua dimanfaatkan untuk memata-matai tindak kriminalitas yang terjadi di desa-desa dengan diperkuat oleh polisi-polisi desa yang disebut *jagabaya* yang mana mereka merupakan seorang yang memiliki kemampuan bela diri maupun ilmu gaib, hal tersebut menunjukkan bahwa pada saat itu pemerintah kolonial Hindia Belanda masih mempercayai tradisi Jawa untuk mengatasi kriminalitas. Lalu, kegiatan ronda malam, pemagaran rumah, penutupan akses jalan ketika malam hari, dan juga pengejaran terhadap para bandit juga telah dikerahkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda.

Para warga pun tidak diperbolehkan untuk mengatasi peristiwa perbanditan serang diri, mereka diharuskan untuk melapor melalui isyarat bunyi dari memukul kentongan dengan ritme yang berbeda. Ritme tersebut memiliki perbedaan makna dalam setiap pukulannya, yaitu apabila kentongan dipukul secara berkali-kali berarti menandakan adanya kasus *kecu*. Lalu, apabila kentongan dipukul secara dua kali maka terdapat kasus pencurian. Untuk pukulan kentongan secara tiga kali menandakan adanya kasus kebakaran. Pukulan kentongan secara empat kali menandakan adanya banjir dan untuk pukulan kentongan secara lima kali berarti terdapat kasus pencurian hewan. Namun, sayangnya upaya tersebut tidak bisa dikatakan berhasil dengan maksimal karena hanya dapat mengusir para bandit dari wilayah perdesaan yang terdapat penduduk Eropa saja, wilayah perdesaan yang tidak ada penduduk Eropa masih terus dikunjungi oleh para bandit untuk melakukan pencurian. (Tifaransyah dkk. 2021:20–21)

Pada akhirnya, lambat laun kriminalitas perbanditan ini bukan meningkat namun semakin berkurang dan hampir tidak pernah ada lagi setelahnya. Hal tersebut disebabkan karena mulai adanya organisasi-organisasi pergerakan yang mulai bermunculan. Seperti lahirnya organisasi Sarekat Islam pada tahun 1912, organisasi ini memberikan kesempatan kepada penduduk kalangan menengah ke bawah seperti petani dan buruh untuk menyampaikan aspirasinya. Hal tersebut menjadikan Sarekat Islam sebagai salah satu organisasi yang mampu

mengusahakan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Memiliki anggota dari berbagai kalangan atau lapisan masyarakat mendorong lahirnya kepentingan bersama karena memiliki kesamaan nasib dan tujuan. Mereka bersatu untuk membela hak bumi-putera dari kejamnya kebijakan yang telah diberlakukan oleh pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Selain itu, tak hanya sebagai pemecah masalah dari peristiwa kriminalitas perbanditan, Sarekat Islam juga menjadi alat untuk mencari identitas kebangsaan kaum pribumi di Surakarta. (Rahmana 2018: 56–57).

## **KESIMPULAN**

Pada masa kolonial Hindia Belanda tindak kriminalitas merupakan hal yang sering menjadi kontroversi bagi bangsa Indonesia. Mulai dari pencurian, perampokan, pembunuhan, dan lain sebagainya akibat dari ketimpangan sosial dan ekonomi yang dialami oleh petani akibat kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda melahirkan adanya suatu kelompok perbanditan sebagai bentuk protes sosial petani terhadap pencurian lahan tanah oleh pihak perkebunan. Berbagai peristiwa pembunuhan dan perampokan terjadi di wilayah Surakarta semenjak adanya peristiwa pembakaran di wilayah Probolinggo yang dilakukan oleh para bandit secara individual maupun berkelompok. Tentu saja aksi para bandit ini memberikan dampak negatif terutama bagi pemerintah kolonial Hindia Belanda, pengusaha swasta, dan juga masyarakat menengah ke atas. Kekhawatiran mereka pun mulai diatasi dengan upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan, namun tidak dapat dikatakan berhasil karena perbanditan terus meraja lela. Hingga pada akhirnya jumlah aktivitas perbanditan dapat perlahan berkurang ketika munculnya organisasi-organisasi yang mampu menampung keresahan dan pendapat para petani dan juga para bandit, seperti organisasi yang bernama Sarekat Islam. Walaupun, setelah berkurangnya aktivitas perbanditan tersebut akan muncul konflik-konflik lain pasca peristiwa tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Kuntowijoyo. 2013. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Pranoto, Suhartono W. 2008. *Bandit Berdasi – Korupsi Berjamaah: Merangkai Hasil Kejahatan Pasca Reformasi*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Purwaningsih, S. M., dan T. N. Aji. 2020. *Sejarah Sosial*. Surabaya: Unesa University Press.
- Suhartono. 1995. *Bandit-bandit Pedesaan di Jawa: Studi Historis 1850-1942*. Yogyakarta: Aditya Media.

### Makalah

- Gemilang, P. N. dkk. 2021. “Kriminalitas Di Kota Surakarta Dalam Konteks Historis: Studi Kasus Tindakan Perkecuan Awal Abad Ke-20”. Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya.

### Jurnal

- Messina, C. B. 2021. “Bandits, Brigands and Militants: The Historical Sociology of Outlaws.” *Journal of Historical Sociology* 34(3).
- Rahmana, Siti. 2018. “Sarekat Islam: Mediasi Perkecuan di Surakarta Awal Abad Ke-20.” *JUSPI: Jurnal Sejarah Peradaban Islam* 2(1).
- Riyadi, R. 2013. “Modernisasi Kota Surakarta Awal Abad XX.” *Candi* 6(2).
- Tifaransyah, F. dkk. 2021. “KRIMINALITAS DI JAWA PADA MASA KOLONIAL.” *Jurnal Candra Sangkala* 3(2).
- Susanto. 2017. “Nuansa Kota Kolonial Surakarta Awal Abad XX: Fase Hilangnya Identitas Lokal.” *Jurnal Sejarah Citra Lekha* 2(1):4-18.

### Skripsi

- Kurnia, A. 2012. “Perbanditan Sosial di Klaten Tahun 1870-1900.” Skripsi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

### Internet

- Hanggoro, Hendaru Tri. 2019. “Cara pemerintah Kolonial Redam Bandit Sosial.” *Historia.id*. Diambil (<https://historia.id/urban/articles/cara-pemerintah-kolonial-redam-bandit-sosial-Pdlb1>).
- Hanggoro, Hendaru Tri. 2019a. “Aksi Bandit Sosial di Perdesaan.” *Historia.id*. Diambil (<https://historia.id/urban/articles/aksi-bandit-sosial-di-perdesaan-DrLRG/page/1>).
- Hanggoro, Hendaru Tri. 2019b. “Asal Usul Bandit di Perdesaan.” *Historia.id*. Diambil (<https://historia.id/kultur/articles/asal-usul-bandit-di-perdesaan-v5bb9/page/1>).
- Pranata, G. 2022. “Peran Sarekat Islam sebagai Mediator Perkecuan di Surakarta Abad ke-20.” *National Geographic Indonesia*. Diambil

(<https://nationalgeographic.grid.id/read/133110286/peran-sarekat-islam-sebagai-mediator-perkecuan-di-surakarta-abad-ke-20?page=all>).

Welianto, A. 2021. "Kondisi Surakarta Awal Abad ke-20." *Kompas.com*. Diambil (<https://www.kompas.com/skola/read/2021/02/22/223000069/kondisi-surakarta-awal-abad-ke-20?page=all>).

**Surat Kabar**

De Groot, Kolff, dan Co. 1931. "NED.-INDIË Brutale inbraak door gemaske den bandiet bij Solosche bakker. Bakkerszoon en waker gewond; de dader ontsnapt." *De Locomotief*, Februari, 7.